

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena¹. Dalam hal ini diartikan jika terjadi suatu fenomena maka dapat memprediksi fenomena yang lain (konsekuensi) atau dengan adanya suatu fenomena tersebut maka dapat menjelaskan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi (anterseden)². Berdasarkan permasalahan yang telah diangkat oleh penulis, maka diperlukan uraian landasan teori dan konsep.

1. Pariwisata

a. Pengertian pariwisata

Menurut Yoeti dalam Suryadana, apabila ditinjau secara etimologi istilah pariwisata sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yang memiliki persamaan makna dengan *tour*, yang berarti berputar-putar dari suatu tempat ke tempat lain. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kata “pariwisata” terdiri dari dua suku kata yaitu “pari” dan “wisata”. Kata

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cetakan ke-23 (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), hlm. 52

² Sulyanto, *Metode Penelitian Bisnis : Untuk Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Yogyakarta: ANDI, 2018).

“Pari” berarti banyak, berkali-kali, berputar, lengkap dan “wisata” berarti perjalanan, bepergian³.

Menurut Spillane dalam Suwena pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas dan berziarah⁴.

Menurut Suwanto dalam Zaenuri, pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan uang⁵.

Menurut Pitana dan Gayatri pariwisata adalah suatu aktivitas yang kompleks, yang dapat dipandang sebagai suatu sistem yang besar yang mempunyai berbagai komponen, seperti ekonomi, ekologi, politik, sosial, budaya, dan seterusnya dalam hubungan yang saling ketergantungan dan saling terkait (*interconnectedness*), hal ini berarti bahwa perubahan pada salah satu subsistem menyebabkan terjadinya perubahan pada subsistem yang lain, sampai akhirnya ditemukan harmoni yang baru⁶.

³ M.Liga Suryadana dan Vanny Octavia, *Pengantar Pemasaran Pariwisata* (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), hlm. 30.

⁴ I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2017), hlm. 17.

⁵ Muchamad Zaenuri, *Tata Kelola Pariwisata - Bencana Berbasis Collaborative Governance: Konsep, Analisis dan Permodelan* (Yogyakarta: Explore, 2018), hlm. 74.

⁶ I Gede Pitana dan Putu G Gayatri, *Sosiologi Pariwisata* (Yogyakarta: ANDI, 2005).

Sebagai suatu produk yang dijual di pasar wisata, pariwisata merupakan suatu campuran dari 3 komponen utama, yaitu:

- 1) Atraksi dan destinasi
- 2) Fasilitas di destinasi
- 3) Aksesibilitas dari destinasi⁷

Dalam UU No. 10 Tahun 2009 mengenai kepariwisataan, terdapat beberapa pengertian perihal pariwisata, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
- 2) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- 3) Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- 4) Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.

⁷ Kusudianto Hadinoto, *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1996), hlm. 21.

- 5) Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.
 - 6) Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata , aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
 - 7) Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
 - 8) Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata⁸.
- b. Bentuk – bentuk pariwisata
- 1) Bentuk pariwisata dari segi jumlahnya
 - a) *Individual tour* (wisata perorangan), yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan oleh satu orang atau sepasang suami-istri.

⁸ UU No. 10 Tahun 2009

- b) *Family group tour* (wisata keluarga), yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan oleh serombongan keluarga yang mempunyai hubungan kekerabatan satu sama lain.
 - c) *Group tour* (wisata rombongan), yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan bersama – sama dengan dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kebutuhan seluruh anggota kelompok wisata⁹.
- 2) Bentuk pariwisata dari segi maksud dan tujuannya
- a) *Holiday tour* (wisata liburan), suatu perjalanan wisata yang diselenggarakan untuk berlibur, dan bersenang – senang
 - b) *Familization tour* (wisata pengenalan), suatu perjalanan yang dilakukan guna mengenal lebih lanjut bidang atau daerah yang mempunyai terkait dengan pekerjaannya.
 - c) *Education tour* (wisata pendidikan), suatu perjalanan wisata yang dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan, gambaran maupun studi perbandingan mengenai bidang kerja yang dikunjungi.
 - d) *Scientific tour* (wisata pengetahuan), suatu perjalanan yang tujuan pokoknya adalah untuk memperoleh pengetahuan atau penyelidikan terhadap suatu bidang ilmu pengetahuan.
 - e) *Pileimage tour* (wisata keagamaan), yaitu perjalanan wisata yang dimaksudkan guna melakukan ibadah keagamaan.

⁹ Priyadi, *Pariwisata Syariah Prospek dan Pengembangan...* hlm. 26.

- f) *Special mission tour* (wisata kunjungan khusus), suatu perjalanan dengan maksud khusus misalnya misi dagang, misi kesenian dan lain – lain.
- g) *Special programme tour* (wisata program khusus), suatu perjalanan wisata yang dimaksudkan untuk mengisi kekosongan khusus, misalnya *laddies programme*, suatu perjalanan wisata yang dilakukan oleh para istri yang suaminya sedang mengikuti rapat konvensi atau pertemuan khusus.
- h) *Hunting tour* (wisata perburuan), suatu kunjungan wisata yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan perburuan binatang yang telah diijinkan oleh penguasa setempat sebagai hiburan semata¹⁰.

Menurut geografis, dimana kegiatan pariwisata berkembang dibedakan menjadi:

- a) Pariwisata lokal, yaitu jenis kepariwisataan yang ruang lingkungannya lebih sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja, misalnya kepariwisataan kota denpasar, kepariwisataan kota bandung dan lain-lainnya.
- b) Pariwisata regional, yaitu kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan dalam suatu wilayah tertentu, dapat regional dalam lingkungan nasional dan dapat pula regional dalam ruang

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 27-28.

lingkup internasional, misalnya kepariwisataan bali, yogyakarta dan lain-lainnya.

- c) Pariwisata nasional, yaitu jenis pariwisata yang dikembangkan dalam wilayah suatu negara.
- d) Pariwisata regional-internasional, yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang disuatu wilayah internasional yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dari dua atau tiga negara dalam wilayah tersebut, misalnya kepariwisataan ASEAN dan lainnya.
- e) Pariwisata Internasional, yaitu kegiatan kepariwisataan yang terdapat atau dikembangkan di banyak negara di dunia¹¹.

c. Pengembangan pariwisata

Pengembangan produk wisata adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan tujuan memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu objek dan daya tarik wisata sehingga mampu menjadi mapan dan diminati dan dipilih untuk dikunjungi oleh wisatawan serta mampu memberikan suatu manfaat baik bagi masyarakat di destinasi pariwisata dan daya tarik dan lebih lanjut akan menjadi pemasukan bagi pengelola maupun pemerintah¹².

Selama melakukan perjalanan wisatawan tentu membutuhkan berbagai fasilitas/sarana wisata. Pola pengembangan pariwisata dari

¹¹ Suwena dan Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, 2017... hlm. 19.

¹² Eddyono, *Pengelolaan Destinasi Pariwisata...* hlm. 75-76.

perjalanan dan kebutuhan wisatawan yang diperlukan pada umumnya meliputi:

- 1) Kebutuhan akan transportasi untuk mencapai tempat wisata, baik berupa angkutan darat, udara maupun laut. Dalam hal ini secara umum memuat akan aspek aksesibilitas yang merupakan salah satu aspek penting guna mendukung pengembangan pariwisata, karena menyangkut pengembangan lintas sektoral.
- 2) Kebutuhan akan penginapan dengan tarif dan pelayanan yang sesuai dengan budgetnya, seperti hotel, losmen dan jenis penginapan lainnya.
- 3) Kebutuhan akan makan/minum, baik berupa makanan khas daerah setempat maupun jenis makanan lainnya dan sarana yang mesti tersedia seperti restaurant, rumah makan dan sejenisnya.
- 4) Kebutuhan akan hiburan dan kegiatan rekreasi .
- 5) Kebutuhan barang-barang cinderamata yang spesifik dan khas buatan masyarakat setempat yang dapat dijadikan kenang-kenangan perjalanannya atau oleh-oleh.
- 6) Kebutuhan mendapatkan barang-barang konsumsi/keperluan pribadi, fasilitas yang diperlukan adalah toko serba ada atau toko biasa dengan harga yang bersaing¹³.

¹³ Priyadi, *Pariwisata Syariah Prospek dan Pengembangan.....* hlm. 67 – 68.

Pembangunan pariwisata sebagaimana diungkapkan oleh Moscardo dalam Utama dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni:

- 1) Kualitas, dimana pariwisata diharapkan dapat memberikan pengalaman berwisata yang berkualitas bagi wisatawan dan pada saat yang sama memberikan kontribusi bagi kualitas hidup dari masyarakat di destinasi pariwisata yang bersangkutan sebagai tuan rumah, serta tetap memelihara atau meningkatkan kualitas lingkungan destinasi pariwisata yang dimaksud.
- 2) Keberlanjutan (*sustainability*), berarti bahwa pariwisata didesain sedemikian rupa sehingga dapat memberikan jaminan bagi keberlanjutan sumber daya alam dan budaya yang digunakan sebagai daya tarik, keberlanjutan dukungan masyarakat dan keberlanjutan keinginan wisatawan untuk berkunjung ke destinasi pariwisata yang bersangkutan¹⁴.

2. Pariwisata Halal

a. Konsep pariwisata halal

Kata halal berasal dari bahasa arab yaitu *halla*, *yahillu*, *hillan*, *wahalalan* yang didefinisikan sebagai sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan¹⁵. Selain itu kata halal mencakup semua konsep yang

¹⁴ I Gusti Bagus Rai Utama, *Pemasaran Pariwisata* (Yogyakarta: ANDI, 2017).

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Terj, Ahmadi, dkk) (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2016), hlm. 1.

memiliki konotasi luas pada bidang sosial dan kebudayaan, mendorong muslim untuk menggunakan produk dan layanan yang memajukan kebaikan dan kesejahteraan sosial dalam segala aspek kehidupan, termasuk didalamnya adalah mengenai pariwisata¹⁶. Wisata halal mengacu pada kegiatan dan perilaku wisata yang ditujukan untuk individu dan keluarga yang mematuhi aturan dan prinsip syariah islam yang merupakan hukum islam berdasarkan ajaran Al-qur'an dan tradisi Nabi Muhammad Saw¹⁷.

Istilah pariwisata halal dalam literatur disamakan dengan beberapa istilah seperti *syaria tourism, islamic tourism, halal friendly tourism destination, halal travel, halal lifestyle, friendly travel destinations*¹⁸. Dari berbagai terminologi yang beragam tersebut istilah wisata islami dan halal merupakan yang paling sering digunakan diberbagai literatur¹⁹. Sekilas definisi tersebut menunjukkan pengertian yang hampir sama, namun menurut Battour dan Ismail bahwa penggunaan terminologi wisata halal dan islami berbeda. Wisata islam seperti menjelaskan aktifitas atau produk tertentu yang “islami” yakni memberikan indikasi bahwa aktivitas atau produk tersebut sepenuhnya memenuhi syariat islam (yang mungkin tidak berlaku pada setiap

¹⁶ Ahmad Jamal, Razak Raj, dan Kevin Griffin, ed., *Islamic Tourism: Management of Travel Destinations*, Januari 31, 2019 (Boston: CABI, 2019), hlm. 11.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Noviantoro dan Zurohman, *Prospek Pariwisata Syariah...*, hlm. 84.

¹⁹ Eka Dewi Satriana dan Hayyun Durrotul Faridah, *Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan*, *Journal of Halal Product and Research (JHPR)* Vol. 01 No. 02 Tahun 2018, hlm. 34.

produk dan atau kegiatan pariwisata halal). Selain itu penggunaan istilah islami hanya diterapkan pada hal yang berhubungan langsung dengan iman dan ajaran islam (seperti hukum islam/syariah, nilai-nilai islam, prinsip dan keyakinan, serta ibadah islam). Sementara pariwisata halal didefinisikan sebagai setiap objek atau tindakan pariwisata yang diperbolehkan menurut ajaran islam untuk digunakan atau dilibatkan oleh umat islam dalam industri pariwisata. Dengan definisi tersebut menganggap hukum islam (syariah) sebagai dasar untuk menyampaikan produk dan layanan pariwisata kepada target pelanggan yang mayoritas beragama islam, seperti hotel halal, resor halal, restoran halal dan perjalanan halal. Selain itu definisi ini juga mengklaim bahwa lokasi, aktifitas tersebut tidak terbatas pada dunia muslim, oleh karena itu termasuk layanan dan produk yang dirancang untuk pelancong muslim di negara muslim dan non-muslim. Dan juga menganggap tujuan perjalanan tidak harus religius, dimana hal tersebut menjadi salah satu motivasi umum pariwisata²⁰.

Namun menurut Khan dan Callanon dalam Satriana dan Faridah penggunaan terminologi tersebut relatif dan berbeda dari satu negara dengan negara lainnya, seperti malaysia menggunakan *islamic tourism centre* yang merupakan badan penasehat untuk kementerian pariwisata. Di Turki menggunakan terminologi *halal holiday* sebagai upaya

²⁰ Mohamed Battour dan Mohd Nazari Ismail, *Halal Tourism: Concepts, Practises, Challenges and Future*, Tourism Management Perspectives 19 (1 Juli 2016), hlm, 1-2.

mempromosikan wisata halalnya. Sedangkan di Indonesia menggunakan wisata syariah (*sharia tourism*) untuk mempromosikan wisatanya²¹.

Dalam fatwa DSN-MUI disebutkan bahwa pariwisata syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian destinasi wisata syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah²².

Wisata syariah bukan hanya sekedar wisata religi atau ziarah saja, namun lebih dari itu. Wisata syariah dinilai sebagai cara baru untuk mengembangkan pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi budaya dan nilai – nilai islami tanpa menghilangkan keunikan dan orisinalitas daerah²³. Wisata syariah atau halal ini tidak bersifat eksklusif, namun inklusif bagi semua wisatawan (Muslim dan Non-Muslim), karena inti dari wisata halal menekankan prinsip – prinsip syariah dalam pengelolaan, pelayanan yang santun dan ramah bagi semua wisatawan dan lingkungan sekitarnya²⁴.

²¹ Satriana dan Faridah, *Wisata Halal: Perkembangan...*, hlm. 34.

²² Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016.

²³ Aan Jaelani, *Industri Wisata Halal Di Indonesia: Potensi dan Prospek*, MPRA Paper, 2017, hlm. 7.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 17.

Menurut Noviantoro bahwa destinasi wisata syariah sebenarnya tidak dapat digolongkan secara spesifik, akan tetapi untuk memenuhi standar menuju pariwisata yang syariah setidaknya terdapat fasilitas yang menunjang kebutuhan wisatawan muslim seperti menyediakan makanan halal, tempat sholat (mushala), toilet atau kamar mandi untuk berwudhu, arah kiblat dikamar hotel, informasi waktu shalat, pelayanan saat bulan ramadhan, pencantuman label halal dan tidak halal untuk mengetahui produk yang dikonsumsi oleh muslim, serta tempat rekreasi yang memisahkan antara pria dan wanita. Bisa juga ditambahkan interpretasi objek wisata yang dimasukan unsur nilai – nilai islam sebagai pengingat dan renungan bagi wisatawan muslim, selain itu juga kondisi masyarakat yang saling melengkapi guna terwujudnya destinasi wisata sesuai dengan prinsip syariah²⁵.

Dalam konteks yang luas, kepariwisataan berbasis syariah mencakup segala layanan yang bebas alkohol, keuangan islami, makanan berbasis syariah, saluran TV yang bebas dari acara – acara yang tidak islami, kolam renang terpisah (laki-perempuan), fasilitas peribadatan, transportasi terpisah (laki-perempuan) yang dapat diakses melalui darat, udara dan air, hotel yang memenuhi persyaratan syariah (keluarga/individu, *check in* perempuan lajang/sendirian), sanitasi yang baik dan bersih dan lain sebagainya²⁶.

²⁵ Noviantoro dan Zurohman, *Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism)*, hlm. 285.

²⁶ Priyadi, *Pariwisata Syariah Prospek dan Pengembangan.....*, hlm. 89.

Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan antara pariwisata konvensional, religi dan halal seperti yang dirinci oleh Hamzah dan Yudiana dalam Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah²⁷, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Perbedaan Pariwisata Konvensional, Religi dan Halal

No	Aspek	Wisata Konvensional	Wisata Religi	Wisata syariah/halal
1.	Objek	Alam, budaya, Heritage, Kuliner	Tempat Ibadah, Peninggalan sejarah	Semuanya
2.	Tujuan	Menghibur	Meningkatkan Spritualitas	Meningkatkan spritualitas dengan cara menghibur.
3.	Target	Menyentuh kepuasan dan kesenangan yang berdimensi nafsu, semata-mata hanya untuk hiburan.	Aspek spritual yang bisa menenangkan jiwa guna mencari ketenangan batin.	Memenuhi keinginan dan kesenangan serta menumbuhkan kesadaran beragama.
4.	<i>Guide</i>	Memahami dan menguasai informasi sehingga bisa menarik wisatawan	Menguasai sejarah tokoh dan lokasi yang menjadi objek wisata.	Membuat turis tertarik pada objek sekaligus membangkitkan spirit religi wisatawan. Mampu menjelaskan fungsi dan peran syariah

²⁷ Kementerian Pariwisata RI, *Laporan Akhir Pengembangan Wisata Syariah*, (Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata, 2015), hlm. 13-14.

		terhadap objek wisata.		dalam bentuk kebahagiaan dan kepuasan batin dalam kehidupan manusia.
5.	Fasilitas	Sekedar pelengkap	Sekedar pelengkap	Menjadi bagian yang menyatu dengan objek pariwisata, ritual ibadah menjadi paket hiburan.
6.	Kuliner	Umum	Umum	Spesifik yang halal
7.	Relasi masyarakat dan lingkungan Obyek wisata	Komplementer dan hanya untuk keuntungan materi	Komplementer dan hanya untuk keuntungan materi	Integrated, interaksi berdasar pada prinsip syariah.
8.	Agenda waktu	Setiap waktu	Waktu – waktu tertentu	Memperhatikan waktu

b. Dasar hukum pariwisata

Dasar hukum penyelenggaraan pariwisata yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits, diantaranya²⁸:

1. Q.S Al –Mulk (67):15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ
الْأُنشُورُ ١٥

“Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

²⁸ Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016.

2. Q.S Nuh (71) : 19 -20

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۙ ۱۹ لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۚ ۲

“Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan – jalan yang luas”

3. Q.S Al – Ankabut (29) : 20

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ ۲۰

“Katakanlah : Berjalanlah dibumi, maka perhatikanlah bagaimana (allah) memulai penciptaan (makhluk), kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”

4. Hadits Nabi Muhammad Riwayat Ahmad

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَافِرُوا تَصِحُّوا وَاعْزُوا تَسْتَعْمُوا

“Dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi Saw bersabda: Bepergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi”

c. Prinsip pariwisata halal

Prinsip dalam pengembangan wisata berbasis syariah mencakup:

- 1) Pengembangan fasilitas wisata berbasis syariah dalam skala besar atau kecil beserta pelayanan diluar dan didalam atau dekat lokasi wisata.
- 2) Fasilitas dan pelayanan berbasis syariah tersebut dimiliki dan dikerjakan oleh masyarakat setempat, yang dilakukan dengan bekerja sama atau dilakukan secara individu oleh yang memiliki

- 3) Pengembangan wisata berbasis syariah didasarkan pada salah satu “sifat” budaya tradisional yang lekat pada suatu lingkungan religius atau “sifat” atraksi berbasis syariah yang dekat dengan alam dimana pengembangan lingkungan sebagai pusat pelayanan berbasis syariah bagi wisatawan yang mengunjungi kedua atraksi tersebut²⁹.

Dalam Fatwa DSN-MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah disebutkan beberapa hal berikut ini

- 1) Prinsip dalam penyelenggaraan wisata mesti untuk:
 - a) Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf* dan kemunkaran,
 - b) Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spritual.
- 2) Destinasi wisata wajib memiliki:
 - a) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah
 - b) Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI.
- 3) Destinasi wisata wajib terhindar dari:
 - a) Kemusyrikan dan khurafat

²⁹ Priyadi, *Pariwisata Syariah Prospek dan Pengembangan....* hlm. 92

- b) Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi
- c) Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip – prinsip syariah³⁰.

Secara umum, terdapat 6 (enam) prinsip utama yang diberikan dalam Pedoman Pariwisata Halal Jawa Barat, antara lain:

1) Prinsip mengatur yang diperlukan

Prinsip ini mengatur penyediaan kebutuhan dasar (pangan dan sarana untuk menjalankan ibadah) bagi wisatawan muslim agar menjadi lebih mudah dalam mengaplikasikan gaya hidup halal.

2) Prinsip kemudahan

Prinsip bagi penyedia barang dan jasa pariwisata untuk dapat menyediakan kemudahan (fasilitas, atraksi dan aksesibilitas) dalam menerapkan pariwisata halal bagi wisatawan muslim termasuk kemudahan bagi penyandang disabilitas.

3) Prinsip kesesuaian dengan kemampuan

Prinsip ini menjelaskan bagaimana penyedia barang dan jasa pariwisata halal dan wisatawan muslim dapat melakukan aktivitas

³⁰ Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016.

yang terkait dengan pariwisata halal sesuai dengan kemampuan dan tingkat pemahaman.

4) Prinsip bertahap

Prinsip implementasi pariwisata halal dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan penyedia barang dan jasa pariwisata.

5) Prinsip skala prioritas

Prinsip pengembangan pariwisata halal yang mencakup fasilitas, atraksi, dan aksesibilitas mengacu kepada skala prioritas antara lain mendahulukan kebutuhan dasar muslim (misalnya : pangan).

6) Prinsip Inklusif

Prinsip pariwisata halal harus bermanfaat tidak hanya untuk muslim tetapi juga untuk semua kalangan termasuk penyandang disabilitas³¹.

d. Tahapan pariwisata halal

Pedoman Pariwisata Halal terdiri dari 3 (tiga) tahapan implementasi Pariwisata Halal Jawa barat, yaitu:

³¹ Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, *Pedoman Pariwisata Halal Jawa Barat* (Bandung: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, 2019), hlm. 9-10

Tahap 1 : Pariwisata Ramah Muslim (*Need to Have*)

Tahap 2 : Pariwisata Kondusif untuk Kebutuhan Muslim (*Good to Have*)

Tahap 3 : Pariwisata yang Memenuhi Kaidah Islam (*Nice to Have*)

Untuk lebih lengkapnya mengenai kriteria terkait tahapan diatas dengan pendekatan pada aksesibilitas dan amenitas yang mesti ada, sebagai berikut³²:

³² Ibid, hlm 7.

Tabel 2.2 Kriteria Tahapan Pariwisata Halal Jawa Barat

Kriteria Tahapan Pariwisata Halal Jawa Barat			
Aspek	Tahap I Pariwisata Ramah Muslim (<i>Need to Have</i>)	Tahap II Pariwisata kondusif untuk kebutuhan muslim (<i>Good to have</i>)	Tahap III Pariwisata yang memenuhi kaidah islam (<i>Nice to have</i>)
Fasilitas Umum	Toilet		
	a) Memiliki sarana istinja (bersuci) dengan air yang tersedia cukup b) Toilet pria dan wanita terpisah dan tertutup c) Toilet dalam kondisi bersih	d) Ada pembatas antar urinoir e) Kloset memiliki <i>hand shower</i>	f) Ada <i>urine protector</i> di setiap urinoir
	Tempat ibadah		
	a) Ruang dan lantai ibadah dalam kondisi bersih dan terbebas dari najis b) Ruang ibadah memiliki sirkulasi udara yang baik c) Pencahayaan ruang ibadah yang cukup	e) Tersedia perlengkapan shalat yang bersih f) Tersedia jadwal waktu shalat yang sesuai	g) Tersedia pembatas antara ruang shalat pria dan wanita h) Tersedia Al – Quran i) Penyediaan Imam dan muadzin yang kompeten

	d) Tersedia arah petunjuk kiblat		
	Tempat wudhu		
	a) Memiliki sarana berwudhu dengan air yang cukup b) Tempat wudhu dalam kondisi bersih dan terbebas dari najis c) Tempat wudhu terpisah antara pria dan wanita	d) Tempat wudhu (terutama) wanita tertutup e) Tempat wudhu & toilet yang terpisah f) Saluran pembuangan air bekas wudhu yang baik	g) Adanya keset air atau sarana untuk menghindari masuknya najis ke tempat wudhu
Fasilitas pariwisata	a) Tersedianya toilet, tempat wudhu dan tempat ibadah yang memadai b) Tersedianya pilihan jasa makanan dan minuman halal c) Tersedianya pilihan jasa hiburan dan rekreasi yang tidak mengarah pada pornoaksi dan pornografi d) Memiliki image positif dan aman	e) Tersedianya pilihan jasa makanan dan minuman yang bersertifikat halal f) Tersedianya pilihan hotel halal hilal 1 g) Tersedianya pilihan spa halal hilal 1 h) Tersedianya restoran halal hilal 1	i) Tersedianya pilihan hotel halal hilal 2 j) Tersedianya pilihan spa halal hilal 2 k) Tersedianya restoran halal hilal 2 l) Tersedianya pramuwisata yang telah mendapatkan pelatihan tentang pariwisata halal dari lembaga yang diakui.

Aksesibilitas	<p>a) Tersedianya toilet, tempat wudhu dan tempat ibadah yang memadai di bandara/stasiun KA/dermaga/pelabuhan/terminal</p> <p>b) Tersedianya pilihan jasa makanan dan minuman yang halal di bandara/stasiun KA/dermaga/pelabuhan/terminal</p> <p>c) Tersedianya pilihan jasa makanan dan minuman yang halal di moda transportasi (khususnya pesawat, kereta api, dan kapal laut)</p>	<p>d) Penambahan pemakaian bahasa arab dan bahasa inggris dalam petunjuk arah</p> <p>e) Tersedianya pilihan jasa makanan dan minuman bersertifikat halal di bandara/stasiun KA/dermaga/pelabuhan/terminal</p> <p>f) Tersedianya pilihan jasa makanan dan minuman yang bersertifikat halal di moda transportasi (khususnya pesawat, kereta api, kapal laut)</p>	<p>g) Tersedianya ruang menyusui yang tertutup.</p>
---------------	--	--	---

d. Tujuan pariwisata halal

Konsep mengenai pariwisata syariah didalamnya memuat mengenai:

1. Menciptakan kesempatan kerja melalui pertumbuhan ekonomi inklusif
2. Mengembangkan komunitas yang hidup, seimbang, dan berdaya tahan,
3. Menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi penduduk lokal dan memberi kontribusi yang lebih baik pada sektor wisata lain dari itu³³.

Pengembangan wisata berbasis syariah dapat mencerminkan

1. Pertumbuhan kepariwisataan dan ekonomi
2. Meningkatkan pengalaman kerohanian para pengunjung
3. Tata kelola pemerintahan yang baik³⁴

Ketentuan mengenai destinasi wisata diarahkan pada ikhtiar untuk:

1. Mewujudkan kemaslahatan umum
2. Pencerahan, penyegaran dan penenangan
3. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan
4. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif
5. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan

³³ Priyadi, *Pariwisata Syariah Prospek dan Pengembangan.....* hlm. 92.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 93.

6. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah³⁵.

3. Aksesibilitas

Aksesibilitas menurut Hadiwijoyo dalam hal pengembangan pada desa wisata adalah faktor-faktor yang mendukung kemudahan wisatawan untuk mencapai desa, seperti papan petunjuk jalan (*signage*), tersedianya moda transportasi yang dapat dimanfaatkan sebagai alat transportasi khusus wisatawan untuk memudahkan wisatawan menjangkau berbagai daya tarik yang dimiliki desa, serta kondisi jalan menuju desa yang baik³⁶.

Komponen aksesibilitas atau kemampuan untuk mencapai destinasi wisata melalui berbagai sarana transportasi. Kegiatan kepariwisataan tergantung kepada aksesibilitas karena salah satu faktor yang mempengaruhi wisatawan melakukan perjalanan wisata adalah masalah jarak tempuh dan waktu. Aksesibilitas ini berkaitan dengan moda transportasi dan prasarana transportasi. Moda transportasi yang baik dapat mengakibatkan jarak seakan-akan menjadi dekat dan prasarana transportasi ini akan mampu menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Suatu destinasi wisata yang tidak memiliki aksesibilitas yang baik maka wisatawan tidak bisa mengakses destinasi wisata tersebut sehingga destinasi wisata tidak dapat berkembang dengan baik³⁷.

³⁵ Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016.

³⁶ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), hlm. 40

³⁷ Eddyono, *Pengelolaan Destinasi Pariwisata....* hlm. 45.

Aksesibilitas atau kelancaran wisatawan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan perpindahan dalam jarak dekat, menengah ataupun jauh. Seluruh kemudahan akses yang diberikan bukan hanya kepada calon wisatawan ketika berada di destinasi, akan tetapi juga kemudahan keseluruhan perjalanan ke destinasi pariwisata yang dikunjungi³⁸.

Aksesibilitas merupakan suatu tingkat kemudahan bagi seseorang untuk mencapai suatu lokasi tertentu, aksesibilitas ini sangat terkait dengan jarak lokasi suatu daerah terhadap daerah lainnya khususnya jarak lokasi ke pusat-pusat pelayanan publik (*public service*) yang secara spasial identik dengan ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota. Selain terkait dengan jarak lokasi, aksesibilitas juga terkait dengan waktu dan biaya³⁹.

Penentuan aksesibilitas ditentukan antara lain berdasarkan faktor jarak/lokasi kawasan, jaringan jalan, dan keberadaan sarana transportasi. Selain itu juga mengikutsertakan kondisi topografi atau ketinggian wilayah sebagai faktor penghambat aksesibilitas. Berdasarkan faktor jarak/lokasi kawasan, nilai aksesibilitas sangat terkait dengan lokasi suatu wilayah lainnya khususnya dari pusat aktivitas masyarakat yang biasanya terkait dengan pasar⁴⁰.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 83.

³⁹ Umrotul Farida, *Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Pedesaan Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal*, Jurnal Wilayah Dan Lingkungan Vol. 1 No. 1 Tahun 2013), hlm. 52.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 58.

Dalam UU No 50 Tahun 2011 menyebutkan aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan didalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

Pembangunan aksesibilitas pariwisata, meliputi:

- a. Penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyebrangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api
- b. Penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyebrangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api, dan
- c. Penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyebrangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api⁴¹.

4. Amenitas

Amenitas menurut Hadiwijoyo adalah sumber daya khusus yang dibutuhkan oleh wisatawan dalam aktifitasnya di desa wisata. Fasilitas – fasilitas yang dibuat ini dapat memanfaatkan sumber daya yang telah dimiliki desa atau membuat sesuatu yang baru sesuai kebutuhan namun

⁴¹ UU No. 50 Tahun 2011

tidak meninggalkan karakteristik dan keunikan desa tersebut, beberapa contoh fasilitas desa wisata yang umum sebagai berikut:

- a. Fasilitas perkemahan
- b. Fasilitas makan – minum (warung/ warung makan, catering dll)
- c. Pusat jajanan dan cinderamata (show room bersama)
- d. Pusat pengunjung (*visitor center*)
- e. Sarana lainnya (Homestay, villa, rumah makan, dll)⁴²

Amenitas adalah fasilitas pendukung yang diperlukan untuk mendukung kegiatan di kawasan pariwisata. Amenitas ini bertujuan untuk menciptakan kenyamanan bagi wisatawan di suatu destinasi wisata. Hal-hal yang termasuk dalam amenitas adalah kebutuhan akomodasi, fasilitas hiburan dan layanan catering/jasa boga⁴³.

Dalam UU No 50 Tahun 2011 juga disebutkan terkait Amenitas atau fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata⁴⁴.

Menurut Yoeti yang dimaksud prasarana (*infrastructure*) adalah semua fasilitas yang memungkinkan proses perekonomian dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan manusia untuk

⁴² Hadiwijoyo, *Perencanaan Pengembangan Desa....* hal. 41-42

⁴³ Eddyono, *Pengelolaan Destinasi Pariwisata....* hlm. 45.

⁴⁴ UU No. 50 Tahun 2011.

memenuhi kebutuhannya. Dalam pengertian ini yang termasuk kedalam bagian pariwisata adalah

a. Prasarana Umum

Yaitu prasarana yang menyangkut kebutuhan umum bagi kelancaran perekonomian. Adapun yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya adalah:

- 1) Sistem penyediaan air bersih
- 2) Pembangkit tenaga listrik
- 3) Jaringan jalan raya dan jembatan
- 4) Airport, pelabuhan laut, terminal, stasiun
- 5) Kapal tambang (Ferry), kereta api dan lain – lain
- 6) Telekomunikasi

b. Kebutuhan masyarakat banyak (*basic needs of civilized life*), yaitu prasarana yang menyangkut kebutuhan masyarakat banyak dan termasuk dalam kelompok ini ialah: Rumah sakit, Bank, Apotik, Kantor pos, pom bensin, *administration offices* (pemerintahan umum, polisi, pengadilan, badan – badan legislatif, dan sebagainya)⁴⁵.

Berorientasi pada fasilitas wisata, infrastruktur merupakan keseluruhan fasilitas yang diperuntukkan bagi kepentingan umum (termasuk juga wisatawan yang sedang berkunjung) yang memungkinkan orang merasa memperoleh kemudahan, kenyamanan bila berdiam atau datang berkunjung

⁴⁵ Oka A Yoeti, *Pemasaran Pariwisata* (Bandung: Angkasa, 1996), hlm. 8-9.

di destinasi tujuan wisata tersebut. infrastruktur, dibagi dalam tiga kelompok yaitu

- a. *General infrastructure*, yang termasuk dalam kelompok ini adalah sistem penyediaan air bersih, tenaga listrik, jalan jembatan, telekomunikasi, dan sebagainya.
- b. *Basic needs of civilized life*, merupakan keperluan manusia modern pada umumnya seperti tersedianya kantor pos, rumah sakit, apotik, pusat perbelanjaan, pompa bensin, bengkel mobil, salon kecantikan, toko buku dan sebagainya.
- c. *Tourist infrastructure* yang merupakan semua bentuk fasilitas, pelayanan, dan kemudahan untuk wisatawan dalam melakukan perjalanan di daerah tujuan wisata, termasuk diantaranya adalah:
 - 1) *Residential tourist plans* seperti *hotels, motels, pensions, furnished flats, furnish room; social tourism establishment* seperti *holiday villages, camping areas, caravan sites, youth hotels, ketersediaan katering; restoran, tavern, self service, grill room* dan lain – lain.
 - 2) *Receptive tourist plants*, termasuk dalam kelompok ini adalah yang disebut dengan istilah *for organization of travel* seperti *travel agen, tour operator, rent a car, excursion and sightseeing agent*, dan lain – lain⁴⁶.

⁴⁶ Eddyono, *Pengelolaan Destinasi Pariwisata....* hlm. 84-85.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini dicantumkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan memiliki kemiripan akan penelitian dari penulis. Hal ini dimaksudkan guna membedakan dengan penelitian dari penulis sehingga tidak terjadi adanya plagiasi.

Pertama, analisis dari jurnal penelitian yang dilakukan oleh Amira Dzatin Nabila dan Dyah Widiyastuti yang berjudul *Kajian Atraksi, Amenitas, dan Aksesibilitas Untuk Pengembangan Pariwisata Umbul Ponggok di Kabupaten Klaten*.

Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis kondisi Umbul Ponggok dilihat dalam hal atraksi, amenitas, aksesibilitas dan pengelolaan wisata serta memberikan alternatif strategi pengembangan objek wisata. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif yaitu untuk mendeskripsikan profil daya tarik wisata dan pengelolaan wisata umbul ponggok. Metode analisis data deskriptif kualitatif dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Umbul Ponggok memiliki atraksi, amenitas dan aksesibilitas wisata yang baik dan memadai sehingga bisa dikatakan objek wisata, namun dari segi amenitas dari pos pertolongan pos pertama, agen perjalanan dan lahan parkir masih belum memenuhi. Pengelolaan wisata umbul ponggok berada pada satu tangan yaitu Bumdes Tirta Mandiri yang menjadikan pengelolaan tersentral pada satu pihak. Melalui analisis SWOT, alternatif strategi yang dapat diberikan adalah selalu melakukan inovasi atraksi yang unik dan berbeda dengan objek wisata lain.

Untuk persamaannya dengan peneliti adalah dari adanya kesamaan aspek yang diteliti yaitu amenitas dan aksesibilitas. Kemudian dari segi metode penelitiannya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sementara dari perbedaannya adalah dari segi tambahan teknik analisis data yang digunakan oleh Amira dengan analisis SWOT dan dalam hal waktu serta lokasi penelitian yang berbeda.

Kedua, Identifikasi Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas dan Acilliary TWA Gunung Tunak Desa Mertak Kecamatan Pujut Lombok Tengah oleh Lalu Adi Permana, Weni Retnowati, Muhammad Akhyar, G.A Sri Oktaryani.

Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi atraksi, aksesibilitas, amenitas dan *ancillary* taman wisata alam (TWA) gunung tunak desa mertak kecamatan pujut Lombok Tengah. Metode penelitian dengan menggunakan penelitian deskriptif. Hasil penelitian TWA Gunung Tunak memiliki tiga jenis atraksi wisata, yaitu wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan. Amenitas atau fasilitas yang terdapat pada pariwisata tersebut antara lain seperti pusat informasi, gerung serba guna, pondok wisata, pondok pemandu serta areal perkemahan. Terkait dengan akses menuju TWA dengan jalan raya, namun akses lokasi di TWA masih kurang bagus, dan taman ini hanya bisa diakses dengan kendaraan pribadi. Terakhir terkait aspek ancillary atau pelayanan tambahan sudah cukup memadai seperti listrik kemudian adanya koordinasi segala macam aktivitas dan peraturan daerah tentang desa wisata. Selain itu adanya lembaga pengelolaan dalam hal ini BKSD NTB, *tourist information*

dinas pariwisata NTB dan kabupaten lombok tengah dan masyarakat yang tergabung dalam kelompok sadar wisata (pokdarwis) tunas besopq.

Untuk persamaanya adalah dari segi aspek yang diteliti yaitu adanya amenities dan aksesibilitas, kemudian menggunakan penelitian deskriptif. Sementara dari segi perbedaanya adalah dalam hal lokasi serta waktu penelitian.

Ketiga, Pengembangan Pariwisata Halal Desa Setanggor oleh Feriyadin, Akhmad Saufi, Baiq Handayani Rinuastuti.

Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola desa wisata setanggor menawarkan pengalaman berwisata yang unik dengan menikmati atraksi alam, atraksi seni budaya, atraksi makanan lokal dan atraksi wisata halal. Dalam hal pengembangannya, pengelola pariwisata di desa setanggor menggunakan beberapa hal, yaitu menggunakan pendekatan partisipatif, menawarkan potensi kelokalan, menghadirkan pengaruh positif pariwisata, menguatkan promosi pariwisata dan membangun kerjasama dengan pihak luar seperti dalam hal ini pemerintah daerah, swasta, media , akademisi dan komunitas.

Untuk persamaanya adalah dari metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan adanya aspek dalam hal pengembangan pariwisata halal, namun yang menjadi pembeda adalah dari pendekatan analisis data yang digunakan dimana Feriyadin lebih memfokuskan pada hal – hal yang dilakukan pada objek yang diteliti dalam pengembangan pariwisata halalnya sementara peneliti sendiri dalam aspek pengembangan pariwisata halal dijadikan sebagai

pendukung dalam variabel aksesibilitas dan amenities yang sudah ada di objek penelitian terkait. Kemudian yang menjadi perbedaan selanjutnya adalah dalam hal waktu serta lokasi penelitian yang diteliti.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka konsep atau kerangka pikir merupakan suatu kesatuan pengertian tentang sesuatu hal atau persoalan yang perlu dirumuskan sesuai dengan maksud kita memakainya. Hal ini berfungsi untuk menyederhanakan arti kata atau pemikiran tentang ide – ide, hal-hal dan kata benda-benda maupun gejala sosial yang digunakan agar orang lain yang membacanya dapat segera memahami maksudnya sesuai keinginan penulis yang memakai konsep tersebut⁴⁷.

Pariwisata halal atau wisata syariah bukan hanya sekedar wisata religi atau ziarah saja, namun lebih dari itu. Wisata halal dinilai sebagai cara baru untuk mengembangkan pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi budaya dan nilai – nilai islami tanpa menghilangkan keunikan dan orisinalitas daerah⁴⁸.

Desa Nanggewer memiliki potensi dalam pengembangan pariwisata halal. Hal ini terlihat dari sosial kemasyarakatan yang menjunjung tinggi nilai – nilai islami, seperti dalam kegiatan pariwisata adalah adanya peraturan yang ketat bagi wisatawan laki-laki dan perempuan yang kemping untuk tidak satu tenda,

⁴⁷ Mardalis, *Metode Penelitian (suatu pendekatan proposal)*, 13 ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).

⁴⁸ Aan Jaelani, *Industri Wisata Halal Di Indonesia: Potensi Dan Prospek*, MPRA Paper, 3 Januari 2017, hlm. 7.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 17.

kemudian adanya simbol-simbol keislaman yaitu ayat Al-Quran yang ada di gapura masuk destinasi wisata. Dengan keadaan masyarakat tersebut tentu mendukung dalam upaya pengembangan pariwisata halal.

Saat ini daerah yang berada di Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya ini memiliki dua destinasi wisata yaitu Pasir Gowong dan Cipatani. Pasir Gowong merupakan wisata alam berupa bukit yang biasa dijadikan sebagai tempat *take off* paralayang dan tempat kemping, sementara Cipatani merupakan wisata air yang memanfaatkan aliran sungai ciwalen, sehingga bisa dimanfaatkan untuk aktifitas wisata seperti berenang ataupun hanya sekedar menikmati suasana di gazebo–gazebo yang disediakan dipinggiran sungai.

Kondisi lokasi Desa Nanggewer juga dekat dengan pondok pesantren Suryalaya yang memiliki nilai historis dalam dakwah islamiyah yang bukan hanya lokal daerah Tasikmalaya saja namun juga sampai nasional dan bahkan hingga ke luar negeri sebagai pusat dari Tarekat Qodiriah Naqshabandiyah. Setiap bulan biasanya selalu mengadakan acara manakiban yang bisa diikuti jamaah hingga ribuan orang. Hal ini tentu menjadi potensi yang bisa dimaksimalkan dengan adanya para wisatawan religi dari berbagai daerah untuk bisa mengunjungi wisata yang ada di Desa Nanggewer. Maka dari itu perlu untuk melihat bagaimana aspek aksesibilitas dan amenities yang ada di Desa Nanggewer mendukung dalam hal pengembangan pariwisata halal, karena kedua aspek tersebut merupakan faktor penting dalam pariwisata.

Menurut Hadiwijoyo aksesibilitas wisata memuat akan faktor-faktor pendukung yang memudahkan wisatawan dalam rangka menuju atraksi wisata terkait, baik itu dari segi kondisi maupun petunjuk jalan, sementara amenities merupakan fasilitas sarana dan prasarana pendukung wisata yang dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan selama berada di lokasi wisata seperti fasilitas penginapan, perkemahan, rumah makan, pusat cinderamata, *visitors center* dan berbagai fasilitas lainnya⁴⁹. Kemudian dalam kaitannya dengan pariwisata halal, untuk memenuhi standar menuju kesana setidaknya terdapat fasilitas yang menunjang kebutuhan wisatawan muslim seperti menyediakan makanan halal, tempat sholat (*mushola*), toilet atau kamar mandi untuk berwudhu, arah kiblat di hotel, informasi waktu sholat, tersedianya mukena, sarung dengan kondisi kebersihan yang terjaga, bahkan juga termasuk didalamnya adalah bagaimana kondisi masjid yang ramah terhadap perempuan dan anak⁵⁰.

⁴⁹ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), hlm. 40 – 42.

⁵⁰ Kurnia Maulidi Noviantoro dan Achmad Zurohman, *Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism): Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0*, *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 8 No. 2, 2020, hlm. 285.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran